

SKEMA PEMBIAYAAN SYARIAH DARI PERSPEKTIF LOCAL WISDOM LAMPUNG “PIIL PESENGGIRI” (SUATU KAJIAN LITERATUR)

Leni Widiawati

Program Studi Pendidikan Ekonomi Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

E-mail: lenywidiawati26@gmail.com

ABSTRAK

Skema pembiayaan syariah merupakan bagian dari ekonomi islam yang semakin berkembang di indonesia. Perkembangan tersebut harus memperhatikan local wisdom di setiap wilayah mengingat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan suku bangsa atau wilayah tersebut memiliki kearifan budaya yang berbeda-beda. Salah satu local wisdom yang ada adalah Piil Pesenggiri yaitu falsafah hidup yang diyakini oleh masyarakat Lampung. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui tentang skema pembiayaan syariah dari perspektif local wisdom Lampung “Piil Pesenggiri” sehingga dapat diketahui apakah kedua hal tersebut yaitu skema pembiayaan syariah dan Piil Pesenggiri mampu bersinergi dalam memberikan keadilan dan menimbulkan persebaran ekonomi yang merata serta meningkatkan kemaslahatan masyarakat Lampung. Kajian literatur digunakan sebagai metode dalam penulisan artikel ini. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa skema pembiayaan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip local wisdom Lampung “Piil Pesenggiri” yang terdiri dari pesenggiri, bejuluk adek, nemui nyimah, nengah nyappur, dan sakai sambaian sehingga keduanya dapat saling bersinergi untuk pembangunan ekonomi yang adil dan meningkatkan kemaslahatan masyarakat Lampung.

Kata Kunci: *Skema Pembiayaan Syariah, Piil Pesenggiri.*

ABSTRACT

Sharia financing scheme is part of the Islamic economy developing in Indonesia. The development must pay attention to local wisdom of every region considering that Indonesia consists of various tribes having different wisdoms. One of the existing local wisdoms namely "Piil Pesenggiri" is the philosophy of life which is believed by Lampung society. Regarding this issue, this article aims at finding out the sharia financing scheme from the perspective of Lampung local wisdom "Piil Pesenggiri" so that it can be known whether the two are able to work together in giving justice and lead to equitable economic distribution and increase the welfare of Lampung society. Review of literature was used as a method in this article. The results show that the sharia financing scheme is in accordance with the principles of Lampung local wisdom "Piil Pesenggiri" consisting of pesenggiri, bejuluk adek, nemui nyimah, nengah nyappur, and sakai sambaian so that both can work together in a synergy for equitable economic development and improve the welfare of the Lampung society.

Key words: *Sharia Financing Scheme, Piil Pesenggiri.*

I. PENDAHULUAN

Ekonomi dunia mengalami krisis pada tahun 2008-2009 yang lalu, krisis yang terjadi di negara *super power* tersebut berdampak juga pada negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Hal yang mengejutkan bahwa ekonomi islam mampu bertahan dalam menghadapi krisis tersebut, salah satunya karena tidak terpengaruh dengan *BI rate* misalnya Bank Muamalat yang mampu bertahan sedangkan bank konvensional mengandalkan *BI rate* sehingga beberapa perbankan konvensional mengalami likuidasi yang menimbulkan gejolak ekonomi. Krisis keuangan tersebut mendorong negara-negara untuk menurunkan tarif perbankan suku bunga mendekati 0, langkah yang diambil tersebut merupakan prinsip dari ekonomi islam yaitu penghapusan riba. Islam tidak mengenal riba karena bunga merupakan bentuk riba dan merugikan pihak lain maka bank syariah dianggap cukup efisien dalam mengelola risiko (Trabelsi, 2015) dan didukung oleh pendapat FORDEBI dan ADESY yaitu Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam, Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah (2016: 69) bahwa ketentuan pembiayaan islam dijalankan berdasarkan ketentuan yang sesuai dengan AL-Qur'an dan Hadist untuk menciptakan kemaslahatan dan hal ini tercantum dalam Surat Al-Maidah (QS 5: 2) dan Surat Al-Baqarah (2: 275) yang menyebutkan jika umat manusia diperbolehkan melakukan perdagangan dan dilarang untuk melakukan riba serta dianjurkan untuk membantu atau saling tolong menolong dengan sesama umat manusia.

Faktor yang menjadi penyebab krisis dikarenakan gagalnya sistem kapitalis dalam mengatur perekonomian, adanya riba atau perjudian yang menyebabkan uang investasi meningkat lebih besar dari uang produksi, spekulasi dan guncangan pasar, emas digantikan dengan dolar yang tidak stabil, dan kepemilikan umum yang dapat dikendalikan kelompok tertentu (Agustin dan Rahman, 2014). Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa sistem yang selama ini diterapkan sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dunia dan harus mengubahnya menjadi ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan (Majid dan Kassim, 2015) bahwa penerapannya ekonomi syariah berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian dan sistem ini terbukti mampu menjaga stabilitas keuangan di Malaysia.

Hal tersebut menunjukkan eksistensi ekonomi syariah dalam perekonomian dunia sehingga banyak negara yang mengaku bahwa dirinya sudah menjalankan skema pembiayaan syariah, demikian halnya dengan bangsa ini, berbagai perbankan banyak melahirkan atau menawarkan produk-produk dengan skema pembiayaan syariah. Di Indonesia, ekonomi syariah sudah berkembang sejak tahun 1990, perkembangannya terjadi secara besar-besaran baik di daerah pedesaan atau perkotaan dan ekonomi syariah tidak menggunakan sisi *matrealisme* sebagai tolak ukur yang utama tetapi menekankan pada kebahagiaan manusia baik dunia dan akhirat atau biasa disebut dengan *falah* (Kusmanto, Sumarti, Damanhuri, Saharudin: 2017) dan untuk mewujudkan hal ini diperlukan reformasi kebijakan publik yang berorientasi nilai agar pendukung perekonomian islam dapat bekerja dalam tatanan islam karena pemerintah cenderung mengabaikan praktik keuangan islam (Mahyudi, 2015; Hasan, 2016)

Masyarakat harus memahami dan menamakan perbedaan skema ekonomi yang saat ini dianut karena skema tersebut cenderung mengarah pada ekonomi neoklasik dan kapitalis yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dan hanya dirasakan oleh beberapa pihak tertentu meskipun sila ke-5 menegaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tetapi jumlah angka kemiskinan yang semakin menumpuk di daerah pedesaan. Fakta lain menunjukkan bahwa kekuatan neoklasik atau kapitalis ditunjukkan dengan tingkat korupsi yang semakin meningkat dengan tujuan untuk memperkaya diri sedangkan sisi lain terpuruk dengan kesulitan ekonomi, berbeda dengan aliran ekonomi tersebut. Ekonomi islam mampu menggantikan posisi sistem neoklasik tersebut (Mahomedy, 2013). Menurut Atyeh (2015) hal yang membedakan antara ekonomi syariah dengan keuangan lainnya karena sistem ini mempunyai prinsip keseimbangan dalam pendistribusian sumber daya sehingga sistem ini perlu untuk disebarluaskan mengingat saat ini permintaan produk islam mengalami peningkatan.

Ekonomi syariah semakin menunjukkan perkembangan yang baik, tidak hanya institusi perguruan tinggi berbasis islam saja yang mengkaji tentang ekonomi syariah tetapi perguruan tinggi umum juga memberikan mata kuliah ekonomi syariah sebagai salah satu mata kuliah wajib seperti yang terjadi di Magister Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya memahami skema ekonomi syariah sudah disadari oleh banyak pihak. Pendidikan tentang ekonomi syariah tersebut telah mengajarkan bagaimana bersikap dalam ekonomi islam untuk memproduksi, distribusi, konsumsi dan kegiatan lain dalam ekonomi dengan menggunakan ketentuan islam. Zakat, pelarangan riba, adanya hukum warisan, infaq, sedekah, nafkah, pinjaman bebas bunga, fitrah, wakaf merupakan contoh dari bentuk-bentuk skema pembiayaan yang ada dalam ekonomi syariah yang bertujuan untuk mewujudkan spiritual, moral, intelektual, sosial, dan materi melalui distribusi sumber daya yang langka agar terjadi keadilan sehingga ini akan mengentaskan kemiskinan yang berkelanjutan dan masalah sosial sedangkan ekonomi konvensional tidak mementingkan keadilan (Zia dan Din, 2016; Aziz dan Mohamad, 2016).

Perkembangan dan pemahaman masyarakat terhadap skema ekonomi islam diharapkan akan berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia agar menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh islam, mengingat jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 257.912.349 jiwa dan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Salah satu bagian dari ekonomi syariah adalah skema pembiayaan dalam islam, hal ini merupakan bagian kecil dari ekonomi syariah yang begitu luas dan bersumber dari Keesaan Tuhan bagi umat muslim yaitu Allah SWT yang diaplikasikan ke dalam dunia (Choudhury, 2012). Hal lain yang perlu diperhatikan dalam menerapkan skema pembiayaan syariah yang bertujuan untuk pembangunan harus memperhatikan *local wisdom* yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan penelitian Khan (1991) yang menyatakan bahwa dalam proses pembangunan ekonomi maka semua pihak juga harus memperhatikan budaya lokal wilayah setempat.

Indonesia adalah bangsa besar yang terdiri dari lebih 1.300 suku bangsa sehingga bangsa ini juga kaya akan *local wisdom*. *Local wisdom* tersebut sudah menjadi bagian dari penduduk bangsa ini meskipun setiap wilayah memiliki *local wisdom* masing-masing. *Local wisdom* tersebut menjadi identitas diri bagi masyarakat setempat dan membedakan dengan lainnya. *Local wisdom* mengakar dalam diri masyarakat sehingga membuat *local wisdom* tersebut sebagai suatu kekayaan yang sudah melekat erat dan diyakini dalam diri para pengikutnya sehingga pengembangan skema pembiayaan ekonomi syariah yang diterapkan juga harus memperhatikan *local wisdom* tersebut, dan pada akhirnya ada sinergi yang kuat antara skema pembiayaan syariah dan *local wisdom* suatu wilayah.

Indonesia merupakan wilayah yang luas, salah satu wilayah yang dimiliki adalah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung merupakan provinsi yang terletak di pulau Sumatera dengan luas wilayah 34.623,80 km² dengan jumlah penduduk 9.543.231 Jiwa (Kemendagri, 2015). Provinsi Lampung juga memiliki *local wisdom*, salah satu *local wisdom* di Lampung adalah falsafah hidup penduduknya yang disebut dengan "*Piil Pesenggiri*" meskipun menurut BPS, penduduk Lampung saat ini didominasi oleh suku jawa (61,88%); Sunda termasuk Banten (11,27%); Semendo dan Palembang (3,55%); Bengkulu, Batak, Bugis, Minang dan lain-lain (11,35%); dan Lampung sebesar (11,92%), (Kompasiana, 2012). Angka tersebut menunjukkan hanya sedikit jumlah penduduk asli yang bersuku Lampung tetapi ada pepatah mengatakan "dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung" sehingga semua elemen masyarakat seharusnya memahami falsafah hidup ini karena falsafah ini menjadi salah satu kajian yang diajarkan dalam mata pelajaran muatan lokal maka falsafah tersebut sudah dipelajari sejak seseorang duduk di bangku sekolah dasar di wilayah Lampung.

Masyarakat Lampung memiliki kitab yang dijadikan sebagai sumber tuntunan dalam hidup bermasyarakat, *Piil Pesenggiri* berarti harga diri tetapi untuk memperoleh harga diri tidak dilakukan dengan kesombongan atau kekerasan dengan menindas masyarakat lain. Falsafah ini bersumber dari kitab tersebut yang terdiri dari prinsip-prinsip *Piil Pesenggiri* atau kehormatan; *bejuluk adek* atau keberhasilan yang disebabkan karena rajin bekerja; *nemui nyimah* atau penghargaan dengan menghormati orang lain, ramah tamah; *nengah nyappur* atau persamaan sehingga pandai dalam bergaul; dan *sakai sambaian* atau kerjasama dan gotong

royong sehingga seseorang yang ingin memiliki harga diri baik dimata orang lain haruslah menerapkan prinsip tersebut (Pairulsyah, 2013; Irianto dan Margaretha, 2011).

Piil Pesenggiri merupakan acuan bagi masyarakat Lampung dalam berperilaku karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya digunakan sebagai landasan etika sosial, moral dan agama yang dapat berdampak pada hubungan dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat lainnya sehingga memberikan kontribusi untuk pembangunan masyarakat itu sendiri (Nurdin, 2009) sehingga falsafah tersebut menekankan untuk kebaikan dalam kehidupan seseorang baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Oleh sebab itu, artikel ini akan mengkaji tentang skema pembiayaan syariah dalam perspektif *local wisdom* Lampung “*Piil Pesenggiri*” untuk mengetahui mengenai skema pembiayaan syariah dari perspektif *local wisdom* Lampung “*Piil Pesenggiri*” sehingga dapat diketahui apakah kedua hal tersebut dapat bersinergi dalam memberikan keadilan perekonomian masyarakat Lampung dan dapat menimbulkan persebaran ekonomi yang merata serta meningkatkan kemaslahatan masyarakat Lampung.

II. PEMBAHASAN

A. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang menerapkan aturan atau prinsip-prinsip islam dalam menjalankan segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian seperti produksi, distribusi dan konsumsi dengan menjadikan Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan dasar dalam pengembangan prinsip (Ahmad dan O.K, 2011). Ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional lainnya seperti kapitalis atau neoklasik yang fokusnya untuk meningkatkan kemakmuran dan bukan untuk membagi-bagikan kemakmuran yang dimiliki sehingga akan muncul dua sisi yang berbeda yaitu sisi kaya dan sisi miskin. Sistem ekonomi konvensional tersebut tidak memikirkan tentang keadaan orang lain yang mengalami kesulitan dalam memperoleh atau memanfaatkan sumber daya sehingga akan terjadi ketimpangan karena penguasaan sumber daya oleh pihak tertentu.

Di sisi lain, ekonomi syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan ekonomi konvensional tersebut. Sistem ekonomi dalam islam ini lebih menekankan tentang *falah*. *Falah* merupakan tujuan yang hendak dicapai dari ekonomi syariah yaitu adanya kesatuan atau perpaduan dari keadaan spiritual, budaya, politik, sosial dan kesejahteraan ekonomi di dunia dan hal tersebut akan berdampak pada kebahagiaan akhirat karena islam tidak hanya mengakui kehidupan di dunia tetapi mengakui akan adanya kehidupan lain yang harus dijalani setelah seseorang meninggal dunia dan perilaku yang terjadi di dunia akan berpengaruh terhadap kehidupan selanjutnya. Pada dasarnya, ekonomi syariah menginginkan adanya keadilan yaitu pemerataan dalam pemanfaatan sumber daya sehingga pihak atau kelompok yang memiliki kelebihan harus membagi kelebihan tersebut kepada pihak yang kurang atau pihak yang tidak mampu memanfaatkan sumber daya karena pada dasarnya sumber daya hanyalah amanah atau titipan dari Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah SWT.

Ekonomi syariah akan mengatur hak kepemilikan agar seseorang atau kelompok mengelolanya untuk kepentingan umat manusia. Pemerintah juga menjadi objek yang diatur dalam hal ini yaitu agar memberikan himbauan kepada masyarakat untuk bersedekah pada pihak yang tidak beruntung secara ekonomi. Menjaga kebersihan, mengonsumsi makanan yang halal, adanya keseimbangan dalam segala hal, upah tenaga kerja yang sebaiknya diberikan setelah bekerja dan kejujuran juga merupakan hal-hal yang membedakan ekonomi syariah dengan konvensional (Aravik, 2016). Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang tepat digunakan dalam perekonomian dunia.

B. Skema Pembiayaan Ekonomi

Skema pembiayaan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah. Skema ini bersumber dari Al-Qur'an yaitu kitab suci agama islam dan Hadist yang merupakan sunah-sunah atau ajaran Nabi Muhammad Saw sebagai nabi terakhir yang diyakini oleh umat islam sehingga skema tersebut merupakan perpaduan antara hubungan dengan sesama umat manusia dan hubungan dengan Allah SWT. Aturan tentang pembiayaan ini telah diatur dalam Surat Al-Baqarah (QS 2: 275) yang menyatakan bahwa "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" dan Surat Al-Maidah (QS 5: 2) yang bertuliskan "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" sehingga semua pihak dilarang untuk merugikan orang lain dengan alasan apapun.

Pembiayaan ekonomi dunia saat ini menggunakan dolar sebagai mata uang yang diakui secara internasional tetapi penggunaan dolar tersebut telah menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis 2008-2009 karena sifatnya yang tidak mampu menjaga stabilitas nilai mata uang dan berdampak kepada negara lainnya. Ketidakmampuan dolar dalam menjaga stabilitas karena nilai dolar telah dijadikan komoditi sehingga menimbulkan keuntungan bagi spekulasi yang bertransaksi di pasar uang dan hal ini termasuk dalam riba, sesuai dengan ketentuan islam maka sebaiknya mata uang dikembalikan dalam bentuk emas atau perak dan tidak berdasarkan nilai tukarnya. Islam juga mengatur skema pembiayaan dalam jual beli atau perdagangan, seseorang diperbolehkan untuk berdagang karena melalui perdagangan atau jual beli maka seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, membuka lapangan pekerjaan atas permintaan barang yang dijual, tetapi perdagangan harus dihindarkan dari riba yaitu tambahan yang diberikan atas nilai pokok sesuatu baik pinjaman atau barang dagangan, berdasarkan hal tersebut maka keuntungan yang diperoleh merupakan kompensasi atas hasil kerja pedagang tersebut. Riba menciptakan ketidakadilan seperti peminjaman uang untuk pembelian peralatan mesin, apabila jumlah utang bertambah maka beban bunga akan meningkat sedangkan barang modal yang dibeli terus mengalami penurunan nilai.

Ketentuan berikutnya yaitu membagi apa yang dimiliki seperti kekayaan dan menjamin keamanan orang lain, hal ini biasa disebut dengan zakat, pembayaran zakat dalam islam sudah di atur misalnya seseorang harus memberikan 2,5% dari pendapatannya untuk orang lain dengan tujuan menolong dan agar tercipta pemerataan distribusi pendapatan. Produk ekonomi syariah yang memiliki makna hampir serupa dengan zakat adalah pembayaran infaq tetapi tidak bersifat wajib seperti zakat. Skema pembiayaan lain yaitu waqaf, waqaf merupakan pembiayaan dengan membeli atau membuat sesuatu dalam bentuk barang yang memiliki kebermanfaatan jangka panjang seperti gedung, jadi gedung tersebut dapat digunakan oleh semua orang atau masyarakat luas sehingga akan muncul keadilan bagi penduduk yang tidak dapat mempunyai gedung tetapi dapat memanfaatkan gedung tersebut dan hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menginginkan keadilan bagi semua umat manusia di dunia. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dinyatakan bahwa skema pembiayaan syariah bertujuan untuk keadilan atau pemerataan.

C. *Piil Pesenggiri*

Piil Pesenggiri adalah salah satu bentuk *local wisdom* masyarakat Lampung yang berupa falsafah hidup. Penanaman *Piil Pesenggiri* dilakukan sejak dini kepada masyarakat yang tinggal di provinsi Lampung baik yang bersuku Lampung asli atau suku lainnya karena falsafah ini merupakan salah satu kajian yang dibahas dalam mata pelajaran muatan lokal. *Piil Pesenggiri* memiliki arti harga diri, harga diri tersebut diperoleh melalui berbagai tindakan yang akan meningkatkan pemikiran orang lain terhadap orang tersebut. Prinsip berperilaku sesuai yaitu *pesenggiri* yang merupakan kehormatan sehingga seseorang harus menjaga kehormatan dirinya sendiri atau orang lain dihadapan umum misalnya tidak menggunjing tentang orang lain atau berusaha melakukan pembunuhan karakter orang lain. Aspek selanjutnya yang dapat meningkatkan harga diri masyarakat Lampung adalah suatu keberhasilan atau *bejuluk adek* tetapi keberhasilan yang diperoleh harus berasal dari kerja keras sendiri bukan melalui korupsi, kolusi dan nepotisme.

Nemui nyimah merupakan prinsip berupa pemberian penghargaan kepada orang lain dengan menghormati orang lain atau bersikap ramah misalnya bersikap ramah kepada tamu yang datang ke rumah. *Piil pesenggiri* juga menekankan pada asas persamaan atau yang biasa disebut dengan *nengah nyappur* misalnya seseorang dapat memperlakukan orang lain dengan adil dengan tidak membedakan latar belakang ekonomi keluarga teman sekolah sehingga seseorang akan pandai dalam bergaul dengan berbagai kalangan dan aspek terakhir adalah *sakai sambaian* yang bermakna kerjasama atau gotong royong sehingga masyarakat Lampung harus saling tolong menolong dalam kebaikan jika orang lain mengalami kesulitan.

Pada dasarnya *Piil Pesenggiri* ini merupakan suatu falsafah yang mengajarkan suatu bentuk keselarasan hidup agar seseorang dapat mencapai kebahagiaan dengan membentuk pribadinya menjadi baik, baik untuk dirinya sendiri atau masyarakat sehingga masyarakat Lampung dituntut agar memahami hak dan kewajibannya karena falsafah ini menuntut adanya integritas tinggi. Dengan demikian, *Piil Pesenggiri* akan nampak dengan sendirinya dalam diri seseorang melalui tindakan dan aktivitas yang diperlihatkan atau dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip yang ada di dalam falsafah tersebut tidak hanya sebagai pedoman dalam berperilaku yang berdampak pada pembangunan masyarakat tetapi juga sebagai penyemangat untuk menjaga kehormatan masyarakat Lampung.

D. Skema Pembiayaan Syariah dari Perspektif *Local Wisdom* Lampung “*Piil Pesenggiri*”

Skema pembiayaan syariah merupakan salah satu bagian dari ekonomi syariah yang dibuat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist agar tercapai *falah* sedangkan *Piil Pesenggiri* merupakan *local wisdom* Lampung berupa falsafah hidup yang menuntun masyarakat Lampung dalam berperilaku yang sudah mengakar dalam diri masyarakat. Skema pembiayaan syariah terdiri dari berbagai macam bentuk seperti pembiayaan yang berkaitan dengan pinjam meminjam, jual beli, pembayaran upah, pemberian yang bersifat sukarela dan wajib, tujuan skema tersebut agar terjadi keadilan dalam menggunakan sumber daya. Skema pembiayaan yang tercermin dari produk-produk syariah mengalami perkembangan sehingga perlu untuk melihat tentang skema pembiayaan syariah berdasarkan *Piil Pesenggiri*.

Piil Pesenggiri memiliki 5 prinsip yang terkandung didalamnya yaitu *pesenggiri* atau kehormatan; *bejuluk adek* atau keberhasilan, *nemui nyimah* atau penghargaan dengan menghormati orang lain, ramah tamah; *nengah nyappur* atau persamaan, *sakai sambaian* atau kerjasama, (Pairulsyah, 2013; Irianto dan Margaretha, 2011). Prinsip pertama adalah prinsip *pesenggiri* atau kehormatan. Jika dalam kehidupan sehari-hari atau dalam berperilaku, *pesenggiri* berarti seseorang harus menjaga kehormatan dirinya sendiri atau orang lain dihadapan umum maka prinsip ini dapat dikaitkan dengan skema pembiayaan syariah misalnya berupa infaq atau zakat. Tujuan pembiayaan zakat atau infaq adalah memberikan pendapatan atau kelebihan dalam hal apapun kepada orang lain yang membutuhkan agar tercapai keadilan sehingga orang yang menerima atau memberi zakat dan infaq harus saling menjaga kehormatan diri sendiri dan masing-masing pihak yang terkait misalnya pemberi zakat tetap harus menghormati penerima zakat meskipun sudah diketahui bahwa kedudukannya lebih rendah sehingga prinsip *pesenggiri* dapat berperan dalam hal ini. Skema ini juga sesuai dengan *nemui nyimah* yang merupakan prinsip berupa pemberian penghargaan kepada orang lain dengan menghormati orang lain atau bersikap ramah dengan suka memberi atau menerima, sehingga kegiatan memberi atau distribusi pendapatan baik yang bersifat wajib atau tidak seperti zakat, nafkah dan infaq, warisan sesuai dengan salah satu prinsip yang ada di dalam *Piil Pesenggiri* ini yaitu bersikap baik dengan memberi.

Skema pembiayaan syariah mengenal tentang adanya riba atau penambahan biaya pokok yang tidak sesuai dengan kerja kerasnya dan riba dilarang dalam konteks apapun baik riba yang berasal dari perdagangan atau pinjaman berupa bunga yang dibebankan kepada

peminjam. Anggapan pelarangan tersebut dapat dinilai berdasarkan prinsip *bejuluk adek* yang berarti bahwa keberhasilan harus berasal dari kerja keras sendiri maka pelarangan riba sesuai dengan prinsip ini yang menghendaki adanya kerja keras dari diri sendiri dalam mencapai keberhasilan tanpa merugikan orang lain.

Nengah nyapur adalah prinsip selanjutnya, prinsip ini memaknai tentang adanya persamaan dalam segala hal. Ekonomi Islam juga mengenal adanya persamaan atau keadilan yang berupa pendistribusian sumber daya sehingga akan muncul persamaan atau keadilan dan tidak ada tumpang tindih dalam pemanfaatan sumber daya atau pihak yang dirugikan sedangkan sisi lain diuntungkan. Skema pembiayaan baik pembiayaan yang dilakukan dalam rangka menunaikan kewajiban seperti zakat atau nafkah, dan pembiayaan yang dilakukan dengan unsur sukarela misalnya dalam bentuk pembelian atau pembiayaan gedung sekolah, biasa dikenal dengan istilah waqaf bertujuan agar adanya persamaan atau keadilan sehingga masyarakat yang kurang beruntung atau tidak dapat memanfaatkan sumber daya dapat merasakan atau memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki cukup atau kelebihan manfaat dan pada akhirnya menimbulkan persamaan.

Surat Al-Maidah (QS 5: 2) yang bertuliskan “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” merupakan salah satu acuan dalam ekonomi Islam. Aturan mengenai anjuran dalam tolong menolong juga terdapat dalam *Piil Pesenggiri* yaitu *sakai sambaian* yang artinya tolong-menolong atau gotong royong dalam kebaikan. Skema pembiayaan syariah dalam bentuk apapun sebenarnya bertujuan untuk menolong yaitu menolong agar semua pihak dapat memanfaatkan sumber daya yang sifatnya hanya titipan dari Allah SWT agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Tolong menolong tersebut dapat juga diwujudkan melalui tolong menolong dalam menghadapi risiko yaitu adanya konsep membagi kerugian atau *risk sharing* bagi pihak yang telah bekerjasama dalam suatu usaha. Berdasarkan pembahasan mengenai skema pembiayaan syariah tersebut maka dapat dikatakan bahwa skema tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *local wisdom* Lampung “*Piil Pesenggiri*”.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa skema pembiayaan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip *local wisdom* Lampung “*Piil Pesenggiri*” yaitu (1) kehormatan sehingga harus saling menjaga kehormatan diri sendiri dan masing-masing pihak misalnya pemberi dan penerima zakat. (2) Prinsip *nemui nyimah* berupa pemberian penghargaan kepada orang lain dengan menghormati orang lain atau bersikap ramah yang suka memberi atau menerima jadi kegiatan memberi baik yang bersifat wajib atau tidak. (3) Prinsip *bejuluk adek* yang berarti bahwa keberhasilan harus berasal dari kerja keras sendiri maka pelarangan riba sesuai dengan prinsip ini. (4) Ekonomi Islam juga mengenal adanya persamaan atau keadilan yang berupa pendistribusian sumber daya yang merata, hal ini sesuai dengan prinsip *nengah nyapur* atau persamaan. (5) *Sakai sambaian* yang artinya tolong-menolong atau gotong royong dalam kebaikan, skema pembiayaan syariah dalam bentuk apapun sebenarnya bertujuan untuk menolong yaitu menolong agar semua pihak dapat memanfaatkan sumber daya yang sifatnya hanya titipan dari Allah SWT agar dapat dimanfaatkan dengan merata dan sebaik mungkin. Oleh sebab itu, skema pembiayaan syariah dan *Piil Pesenggiri* dapat saling bersinergi untuk pembangunan ekonomi yang adil dan meningkatkan kemaslahatan masyarakat Lampung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya penulisan artikel ini dapat diselesaikan, dalam pembuatan artikel ini saya mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai penyandang dana untuk menempuh program magister.
2. Panitia Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi yang telah memfasilitasi dalam prosiding dan atau publikasi artikel ini.

3. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung atau tidak langsung dalam pembuatan artikel ini. Saya menyadari artikel ini belum sempurna sehingga saya mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan artikel ini.

REFERENSI

- Agustin, Hamdi., & Rahman, F. A. 2014. The Cause and Solution of Global Financial Crisis: a Perspective of Islam. *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter,3* (7),66 – 72.
- Ahmad, K. &O.K. Ogunsola. 2011. An empirical assessment of Islamic leadership principles.*International Journal of Commerce and Management*, 21 (3), 291-318.
- Arafik, Havis. 2016. *Ekonomi Islam*. Malang: EmpatDua.
- Atyeh, M. H. 2015. The Development of The Islamic Financial System. *International Journal of Arts & Sciences*, 8 (7), 1 – 9.
- Aziz, M. N., & Mohamad, O. B., 2016. Islamic social business to alleviate poverty and social Choudhury, M. A. 2013. The “Impossibility Theorems” of Islamic Economics. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5 (3), 179-202.
- FORBEDI., & ADESY. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. PT Rajagrafindo Persada. Cetakan 1.
- Hasan, Z. N. 2016. From legalism to value-oriented Islamic finance practices. *Humanomics*, 32 (4), 437-458.
- Inequality. *International Journal of Social Economics*, 43 (6), 573-592.
- Irianto, Sulistyowati., & Margaretha, Risma. 2011.*Piil Pesengiri: Modal Budaya dan Strategi Identitas Ulun* Lampung. *MAKARA, Sosial Humaniora*. 15 (2), 140-150.
- Islamic Financial System Help?. *The Journal of Risk Finance*, 12 (1), 15 – 25.
- Kahn, M. A. 1991. The Future of Islamic Economics. *Butterworth-Heinemann Ltd*, 248-261.
- Kementrian Dalam Negeri. *Provinsi Lampung*. <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/18/lampung>. Diunduh tanggal 19 April 2017, pukul 09.10 WIB.
- KompasianaCom. *Mengapa Pendatang ‘Tak Terjajah’ Bahasa Lampung*. http://www.kompasiana.com/abioyiq/mengapa-pendatang-tak-terjajah-bahasa-lampung_550bcf7ca33311e11a2e39b5. Diunduh tanggal 19 April 2017, pukul 09.15 WIB.
- Kusmant, T.Y., Sumarti, T., Damanhuri, D.S., & Saharudin. 2017.Sharia Implementation of Principles in The Dynamics of Economics in The Rural System of Java. *Journal of Arts, Science & Commerce*, 8 (1), 8 – 17.
- M. Shabri Abd. Majid, M. S. A., & Kassim, S. H. 2015. Assessing the Contribution ofIslamic Finance to Economic Growth Empirical Eevidence from Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6 (2), 292-310.
- Mahomedy, A. C. 2013. Islamic economics: still insearch of an identity. *International Journal of Social Economics*, 40 (6), 556-578.
- Mahyudi, M. 2015. Reviving the Islamic Economic System Through Shariah-Based Public Policy. *Humanomics*, 31 (4), 415-429.
- Nurdin, A. F. 2009. Integralisme Islam dan Nilai-nilai Filosofis Budaya Lokal padaPembangunan Propinsi Lampung. *UNISIA*, 32 (71), 81 – 97.
- Pairulsyah. (2013). Kualitas Pelayanan Publik Samsat Lampung dalam Perspektif Budaya *Piil Pesengiri. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (2), 168-180.
- Trabelsi, M. A. 2011. The Impact of The Financial Crisis on The Global Economy: Can The Zia, M. D., & Din, N. N. 2016. Islamic Economic Rationalism and Distribuion of Wealth: A Comparative View.*IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*. 18 (4), 43 – 52.